

# REFORMASI GELOMBANG KEDUA

Oleh : Angelina Sondakh, SE, MSi  
Anggota Komisi X DPR-RI, Wakil Sekjen DPP-PD

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, menjelang peringatan proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, presiden selaku kepala Negara akan memberikan pidato kenegaraan di depan rapat paripurna DPR-RI. Tradisi ini sudah menjadi sebuah konvensi yang selalu dilakukan menjelang peringatan hari kemerdekaan, untuk menegaskan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai maupun arti sebuah kemerdekaan bagi bangsa ini. Oleh sebab itu, bukanlah hal yang aneh apabila dalam setiap pidatonya, kepala negara selalu mengingatkan kembali arti kemerdekaan dan cita-cita dari para *founding fathers* serta perjuangan para pendahulu kita.

Pada kesempatan seperti ini, biasanya diundang pula berbagai tokoh maupun figur anggota masyarakat dari seluruh tanah air, yang dipandang berjasa maupun meraih prestasi tertentu. Kehadiran para "juara" maupun tokoh teladan ini, disamping sebagai sebuah bentuk apresiasi pemerintah terhadap mereka yang telah berprestasi, juga diharapkan dapat mendorong anggota masyarakat yang lain untuk berprestasi lebih baik lagi di bidangnya masing-masing.

Pidato kenegaraan kali ini menjadi terasa sangat istimewa dan sangat penting, ketika mengkaji dan menelaah kembali tentang apa yang telah disampaikan oleh presiden yang disiarkan secara luas ini. Nyaris hampir tanpa membaca teks, presiden menyampaikan dan menjabarkan secara gamblang perjalanan sejarah bangsa ini dimasa lalu, kondisi saat ini dan harapan-harapan ke depan yang harus dicapai bangsa ini.

Secara umum, pidato kenegaraan tahunan ini mencakup beberapa isu pokok, baik dalam konteks ekonomi, politik sosial budaya bahkan secara khusus memaparkan juga tentang kebijakan luar negeri maupun isu pelestarian lingkungan hidup. Dalam konteks pembangunan ekonomi, presiden sekali lagi menegaskan secara eksplisit bahwa perekonomian yang hendak dibangun adalah ekonomi yang berasaskan kerakyatan dimana pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan asas pemerataan. Untuk itu pemberdayaan ekonomi lokal akan mendapatkan prioritas utama dengan bertumpu pada keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*).

Kemandirian menjadi isu utama agar dapat meningkatkan daya saing sehingga faktor sumber daya manusia maupun sumber daya alam (*resources*), penguasaan ilmu pengetahuan (*knowledge*) dan penguatan cultural (*cultural*) merupakan 3 variabel yang harus bersinergi secara positif. Globalisasi ekonomi harus dilihat sebagai sebuah peluang bukan ancaman, namun demikian kapitalisme global maupun liberalisme pasar bukanlah sebuah pilihan. Mekanisme pasar tetap harus dihormati sebagai sebuah syarat pertumbuhan ekonomi tetapi peran pemerintah juga tidak dapat dihindari, agar kepentingan masyarakat, bangsa dan negara terlindungi sebagaimana diamanatkan pasal 33 UUD 1945. Sudah barang tentu, penegasan ini sekali lagi mematahkan sinyal-sinyal tentang isu neolib yang sering dilontarkan pihak tertentu pada masa pilres lalu.

Pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat merupakan hal penting yang mendapatkan perhatian khusus kepala Negara. Pertumbuhan ekonomi harus mampu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan. Pelayanan kesehatan dan pendidikan menjadi salah satu tolak ukur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semenjak presiden SBY memegang tampuk pemerintahan, angka kemiskinan berkurang dari 16,7% pada tahun 2004, menjadi 14,1% sampai bulan Maret 2009. Hal yang tidak berbeda jauh, terlihat pula dari penciptaan lapangan kerja yang telah berhasil disediakan oleh pemerintah. Jika pada tahun 2004 tingkat pengangguran kita masih berkisar 9,9% maka sampai bulan Februari 2009, berhasil kita tekan menjadi 8,1%. Sebuah prestasi yang tidak mudah untuk diraih, ditengah-tengah kondisi sosial ekonomi nasional maupun global yang kurang menguntungkan.

Dibidang sosial budaya, presiden mengajak kita semua untuk melakukan refleksi terhadap sejarah perjalanan bangsa ini, terutama pasca proklamasi kemerdekaan sampai lahirnya masa reformasi, yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Dalam masa itu, berbagai persoalan di bidang sosial, ekonomi dan politik telah memberi warna dan pelajaran tersendiri bagi perjalanan bangsa kita. Kehidupan demokrasi dimaknai dengan berbagai bentuk dan pemahaman sehingga lebih merupakan sebuah proses dalam kerangka mencari bentuk yang tepat (*trial by error*).

Perjalanan bangsa yang panjang dan penuh lika liku ini, telah melahirkan bangsa kita sebagai bangsa pejuang. Semangat etos kerja yang kuat dan gigih harus dipupuk dan dikembangkan sehingga dapat mendorong kita sebagai bangsa yang berbudaya unggul, produktif dan inovatif tegas presiden. Demikian pula dengan keberadaan Pancasila sebagai ideologi dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila harus diposisikan sebagai ideologi pemersatu yang bersifat terbuka, fleksibel serta menjadi sumber inspirasi maupun solusi bagi proses pembangunan bangsa (*nation building*). Oleh sebab itu

persatuan dan kesatuan yang dibangun diatas asas Bhineka Tunggal Ika, harus menjadi komitmen bersama yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Di bidang politik, presiden menegaskan kembali untuk membangun dan mematangkan prinsip-prinsip demokrasi yang egaliter, dimana keterbukaan dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi dasar bagi pembangunan bangsa. Keseriusan presiden untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik ini terlihat jelas dari pengulangan kata ini sampai tiga kali dalam pidatonya tersebut.

Penegakan hukum, penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia, penghormatan terhadap hak-hak politik warga Negara serta kebebasan pers yang bertanggung jawab, merupakan perhatian lain presiden yang tidak kalah pentingnya untuk di catat. Begitu pula dengan komitmen untuk memberantas segala bentuk KKN, merupakan sebuah upaya yang semenjak awal masa kepemimpinannya, dijadikan sebagai prioritas utama dalam program pemerintah.

Mekanisme *checks and balances* diperkuat sebagai upaya untuk menumbuhkan kehidupan demokrasi yang sehat. Beberapa lembaga penopang demokrasi, seperti Mahkamah Konstitusi, KPK maupun DPD diberi porsi untuk tumbuh berkembang sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pilar demokrasi. Kebijakan-kebijakan semacam ini dipandang sebagai amanat reformasi untuk mengawal perubahan yang tetap berkesinambungan. Artinya adalah bahwa apapun yang dilakukan oleh pemerintah, harus diarahkan pada perubahan dan perbaikan yang terukur dan terarah sehingga merupakan sebuah rangkaian yang saling mendukung dan berkesinambungan. Tanpa arah dan tujuan yang jelas, maka tidak mustahil apa yang dilakukan justru kembali ke belakang dan merusak tatanan yang sudah ada.

Pemberantasan dan penuntasan aksi terorisme yang masih menghantui negeri ini, mendapatkan perhatian yang tidak kalah penting dari pemerintah. Terorisme dengan segala bentuk dan alasannya, harus dipandang sebagai musuh bersama yang patut diberantas sampai ke akar-akarnya. Keberhasilan pihak kepolisian dalam mengungkapkan tragedi Marriot dan Ritz Carlton 2 kurang dari satu bulan semenjak kejadian, merupakan sebuah bukti komitmen pemerintah untuk segera menghadapkan mereka yang bersalah ke meja hijau sesuai dengan hukum yang berlaku. Negara harus melawan dan tidak boleh kalah dengan aksi terorisme, tegas presiden. Oleh sebab itu kerjasama dari seluruh komponen masyarakat, sangat diperlukan untuk mengakhiri aksi-aksi yang tidak berperikemanusiaan ini.

Salah satu poin lain yang perlu digaris bawahi dalam pidato kenegaraan kali ini adalah bahwa Dwi Fungsi TNI merupakan sebuah masa lalu yang tidak mungkin diulang kembali. TNI harus kembali ke tugas pokoknya sebagai alat penjaga keamanan dari segala bentuk rongrongan. Oleh sebab itu profesionalisme TNI menjadi perhatian khusus bagi presiden yang banyak dicintai rakyatnya ini. Ini merupakan sebuah *good will* yang baik yang perlu mendapatkan apresiasi.

Presiden mengingatkan kembali akan arti penting menjalin persahabatan dengan negara lain. Politik luar negeri yang bebas dan aktif, benar-benar menjadi sebuah keinginan pemerintah untuk diaplikasikan secara nyata dalam konteks pergaulan dunia internasional. Hubungan kemitraan dan kerjasama antar negara baik di tingkat regional yang dibangun diatas prinsip saling menghormati, merupakan kebijakan yang berhasil dilakukan oleh pemerintah saat ini. Prinsip sejuta kawan tak ada musuh (*a million friends, zero enemy*), merupakan sebuah prinsip cerdas yang patut dikembangkan dan dipertahankan dalam upaya mencapai tata perdamaian dunia yang benar-benar hakiki. Oleh sebab itu, peran politik luar negeri kita saat ini harus dimaknai sebagai sebuah upaya untuk turut menciptakan tata dunia baru yang lebih adil berdasarkan prinsip-prinsip persahabatan dan saling menghormati.

Hal yang tidak kalah menarik dari pidato kenegaraan ini adalah adanya komitmen yang kuat dari presiden selaku kepala negara maupun kepala pemerintahan, untuk mengambil peranan yang lebih aktif dalam masalah lingkungan hidup, baik dalam konteks nasional maupun global. Dalam konteks nasional, pemerintah telah berketetapan hati untuk menerapkan pola pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Begitu juga dalam konteks global, isu-isu perubahan iklim global (*global warning*) telah mendapatkan perhatian yang cukup memadai. Pelaksanaan *UN Conference on Climate Change* di Bali pada tahun 2007 lalu yang menghasilkan *Bali Road Map*, adalah bentuk nyata partisipasi pemerintahan kita dalam menjaga kelestarian bumi sebagai pijakan hidup umat manusia.

Apa yang telah disampaikan oleh presiden pada hakekatnya merupakan rangkuman dari berbagai capaian yang berhasil dilaksanakan serta berbagai harapan kedepan yang akan dilakukan. Secara spesifik presiden telah menegaskan bahwa untuk masa pemerintahan sampai 10 tahun yang akan datang, agenda yang harus dilakukan oleh pemerintah baru adalah menuntaskan agenda-agenda reformasi yang belum selesai dilakukan dengan menitik beratkan pada pemulihan ekonomi akibat dampak krisis 10 tahun lalu untuk bergerak menuju negara maju. Presiden menyebutnya sebagai Reformasi Gelombang Kedua.\*\*\*\*